

Hentikan Penjarahan Pegunungan Kendeng

Masyarakat Pegunungan Kendeng Utara, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, meminta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menghentikan penjarahan hutan dan izin penambangan para investor pabrik semen. Pasalnya, belum ada kebijakan pemerintah tentang pelestarian pegunungan karst itu.

Mereka menyampaikan permintaan itu ketika Ganjar berkunjung ke areal hutan wilayah Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Pati di Desa Sumpersari, Kecamatan Kayen, Pati, Jumat (9/5). Kunjungan Ganjar ini untuk memantau hutan yang gundul akibat pembalakan liar.

Tokoh Sedulur Sikep atau masyarakat adat pengikut ajaran Samin Surosentiko Pati, Gunretno, mengatakan, pembalakan kayu di wilayah KPH Pati, terutama di Kecamatan Kayen, Tambakromo, dan Sukolilo, mengkhawatirkan. Para pembalak liar tidak pernah ditindak tegas sehingga areal hutan yang dijarah makin meluas.

Hutan merupakan sumber hidup alam dan manusia. Kalau hutan rusak, bencana akan datang dan ke depan sumber pangan dan air bisa habis. Masyarakat berharap agar hutan yang gundul di tiga kecamatan itu dihijaukan lagi.

"Kami juga tidak ingin hutan habis dan gunung rusak akibat penambangan berskala besar. Untuk itu, kami meminta agar Gubernur tidak memberikan izin kepada investor besar yang akan menambang kawasan pegunungan karst itu," ungkap Gunretno.

Beberapa hari lalu, Koordinator Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK), Pati, Suyitno, mengatakan, tak kurang dari 4.000 hektar lahan hutan di Pati terancam gundul akibat pembalakan liar.

Administratur KPH Pati Perum Perhutani Unit I Jateng Dadang Ishardianto mengatakan, pembalakan liar di KPH Pati terjadi 3-4 tahun terakhir ini.

Pembalakan liar dilakukan oknum warga setempat untuk memperluas lahan tanaman pangan. Hasil pembalakan liar itu dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

"Untuk mengatasi persoalan itu, Perhutani akan mengelola hutan bersama masyarakat karena selama ini belum pernah dilakukan. Perhutani juga akan meminta masyarakat agar melakukan penjarangan jarak tanam jati sehingga ada ruang untuk tanaman pangan di sela-sela tanaman jati," papar Dadang.

Menanggapi hal itu, Ganjar meminta masyarakat berkomitmen tidak menebangi pohon di hutan Perhutani. Perhutani juga harus menggandeng masyarakat untuk mengelola hutan secara bersama-sama. "Terkait dengan pabrik semen, pemerintah belum memberikan izin dan masih mengkajinya. Mana yang baik untuk masyarakat setempat, saya akan mendorong dan memperjuangkannya," kata dia.